

**ANALISIS DAYA SAING DAERAH KECAMATAN DI KABUPATEN INDRAGIRI
HULU**

Sugeng Riono*, Djaimi Bakce, Ahmad Rifai****

ABSTRACT

The description about the competitiveness of a sub-district region is crucial in order to formulate the region development planning of Indragiri Hulu Regency. Through this study, several descriptions about the region competitiveness typhology were gained and then classified into three categories consisted of low, medium, and high. This study aimed to analyze the typology of district region competitiveness in Indragiri Hulu Regency. Factor analysis and main component analysis, were the method used to determine the three aforementioned categories. The prominent aspect gained from the research was there were four sub-districts that having high level of competitiveness, Rengat, Seberida, Batang Cenaku and Pasir Penyu Sub-district. Furthermore, there were four sub-district that were included in the medium level, there were Lirik, Batang Gangsal, Sungai Lala, and Kuala Cenaku Sub-district. Meanwhile, other six sub-districts that having low level of competitiveness were West Rengat, Batang Peranap, Kelayang, Rakit Kulim, LubukBatu Jaya, and Peranap Sub-district. In terms of increasing the competitiveness of sub-district area in Indragiri Hulu Regency, from nine prominent aspects, there were three aspects considered as the main concern they are the development and improvement of transportation infrastructure and utility, the development and improvement of agricultural resource potency, as well as the development and improvement of the added value towards the agricultural products.

Keywords : *Regional Planning, Regional Competitiveness, Competitiveness Typhology*

* **Sugeng Riono** adalah anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu

** **Djaimi Bakce** dan **Ahmad Rifai** adalah Staf Pengajar Jurusan Agribisnis Faperta Universitas Riau, Pekanbaru

I. PENDAHULUAN

Kemampuan daerah dalam melaksanakan pembangunan berimplikasi pada kemampuan dalam meningkatkan daya saing daerah (*regional competitiveness*). Paradigma baru pembangunan nasional yang diterjemahkan sebagai pembangunan wilayah dalam upaya menjaga keberlanjutan pembangunan (*sustainability development*) perlu menggali dan setelah itu perlu dan harus menerapkan pembentukan keunggulan daya saing nasional dan daerah (Daryanto, 2003).

Perubahan paradigma pembangunan di Indonesia dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi pembangunan dengan diberlakukannya undang-undang otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Sebagai konsekuensinya, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dituntut untuk mampu memahami dan mengelola serta mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki sesuai dengan wewenang yang dimiliki untuk dapat mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah.

Demikian halnya dengan daerah kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu. Secara administrasi saat ini Kabupaten Indragiri Hulu terbagi atas 14 kecamatan, 16 kelurahan dan 178 desa. 14 kecamatan tersebut adalah Kecamatan Peranap, Batang Peranap, Seberida, Batang Gansal, Batang Cenaku, Kelayang, Rakit Kulim, Pasir Penyau, Lirik, Sungai Lala, Lubuk Batu Jaya, Rengat Barat, Rengat dan Kuala Cenaku.

Masing-masing daerah kecamatan kabupaten Indragiri Hulu memiliki kekhasan tersendiri dari aspek sumberdaya yang dimiliki. Kondisi tersebut memberikan peluang bagi daerah kecamatan kabupaten Indragiri Hulu untuk dapat memberdayakan keragaman potensi yang dimiliki secara optimal yang selanjutnya dapat meningkatkan daya saingnya masing-masing. Dengan demikian, penerapan kebijakan otonomi daerah akan dapat mendukung keberhasilan penyelenggaraan pembangunan daerah, sehingga nantinya akan dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) masing-masing daerah.

Pemberian otonomi yang luas secara merata pada masing-masing daerah yang memiliki perbedaan potensi tersebut dikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan atau kesenjangan yang signifikan antar-daerah, sehingga dapat menimbulkan ketidakadilan. Dengan adanya tipologi daerah tersebut, dapat diketahui daerah mana saja yang diberi otonomi luas dan yang masih tetap harus mendapatkan intervensi dari pemerintah pusat. Selain dalam hal pemberian otonomi kepada daerah, tipologi daerah juga dapat membantu dalam penentuan program bantuan atau pinjaman bagi daerah. Oleh karena itu, implementasi kebijakan otonomi daerah perlu disertai dengan penetapan tipologi daerah sesuai dengan potensi riil masing-masing daerah.

Bertitik tolak pada pemikiran tersebut, khususnya mengenai pentingnya peranan pemetaan tipologi daya saing daerah sebagai instrumen untuk memfasilitasi terwujudnya pembangunan antara daerah yang bersinergi, dinamis dan berkelanjutan, maka perlu dilakukan suatu penelitian atau kajian tipologi daya saing daerah yang mencakup data dan informasi daerah yang lebih spesifik. Melalui pemetaan tipologi tersebut diharapkan dapat diperoleh informasi yang dalam dan komprehensif mengenai daya saing daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memetakan dan menganalisis tipologi daya saing daerah kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu.

II. KERANGKA TEORITIS

Pemberian otonomi kepada daerah bertujuan memungkinkan masing-masing daerah mengelola daerahnya dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pembangunan daerah. Untuk itu, daerah perlu dipersiapkan dan diberi kepercayaan untuk membangun daerahnya sendiri, antara lain melalui penyerahan urusan dan wewenang pemerintah dan pembangunan yang sekaligus disertai dengan penyerahan pembiayaan, personil dan perangkat kelembagaan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masing-masing daerah. Kesiapan daerah merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi bahkan menentukan tingkat keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah (Riyadmadji, 1997).

Daerah otonom dalam wilayah Kesatuan Republik Indonesia menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah seperti sekarang ini menggunakan prinsip

otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Paradigma pembangunan daerah yang di terapkan selama ini (sebelum diberlakukannya undang-undang otonomi daerah) lebih bersifat mengeneralisasi keadaan dan permasalahan yang ada. Dalam pengertian telah terjadi keseragaman kebijakan atau arahan pembangunan sebagai konsekuensi dari kuatnya sifat sentra listrik dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang diimplikasikan di daerah-daerah. Padahal, karakteristik antara daerah relatif sangat berbeda yang berimplikasi kepada beragamnya kebutuhan dan kemampuan daerah.

Kondisi tersebut menentukan perlunya diterapkan paradigma pembangunan daerah yang baru yang lebih bersifat desentralistis melalui pemberian otonomi kepada daerah secara luas, nyata, adil, dan bertanggung jawab, sesuai dengan kondisi, potensi, kebutuhan dan kemampuan masing-masing daerah. Kebijakan otonomi daerah berorientasi pada penyerahan wewenang kepada daerah sebagai basis penyelenggaraan pembangunan di daerah. Penyerahan otonomi kepada daerah dimaksudkan agar pembangunan daerah dapat menyentuh masyarakat daerah secara langsung dengan merata, karena dianggap sebagai pihak yang paling memahami kondisi dan permasalahan daerah.

Identifikasi permasalahan dan potensi daya saing daerah Kabupaten Indragiri Hulu didasarkan pada:

1. Beberapa daerah kecamatan mempunyai luas daerah yang sangat luas, sehingga ada daerah yang belum terjangkau oleh pelayanan pemerintah secara efisien dan kegiatan pembangunan belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik.
2. Terdapat daerah kecamatan yang memiliki luas daerah yang relatif sempit, namun memiliki jumlah penduduk yang relatif banyak.
3. Terdapat daerah kecamatan yang mempunyai kepadatan penduduk relatif jarang, sehingga potensi daerahnya belum dapat dimanfaatkan secara optimal.

4. Beberapa daerah kecamatan yang telah memiliki potensi pendapatan daerah yang memadai untuk melaksanakan prinsip otonomi daerah secara dinamis dan bertanggung jawab.

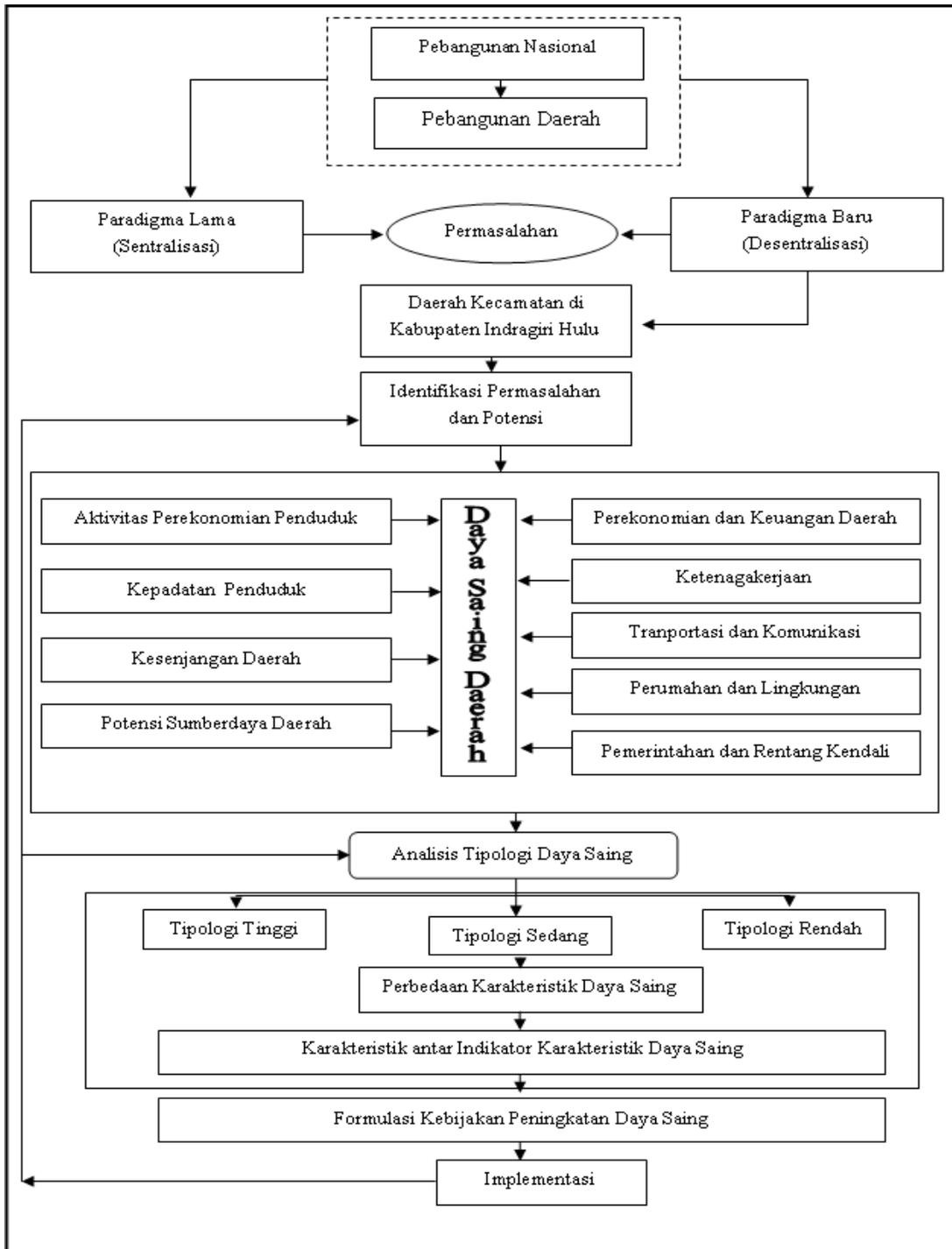
Keadaan daerah tersebut hingga saat ini masih dirasakan oleh daerah kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu, sehingga menjadi fenomena yang menarik untuk dianalisis sehubungan dengan adanya tekad dari pemerintah pusat untuk menitikberatkan implementasi kebijakan otonomi daerah di daerah kabupaten/kota. Sesuai dengan perkembangan paradigma daya saing daerah (*regional competitiveness paradigm*), maka implementasi kebijakan otonomi daerah tersebut diarahkan pada peningkatan daya saing daerah kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu.

Dalam upaya tersebut, terlebih dahulu perlu dan harus memahami potensi-potensi daya saing yang dimiliki oleh masing-masing daerah kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu. Hal tersebut dapat dilakukan antara lain melalui penetapan tipologi daya saing daerah kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu. Penetapan tipologi tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran karakteristik daya saing daerah sesuai dengan kategori klasifikasi masing-masing dan informasi perbandingan, serta hubungan kondisi daya saing antara daerah.

Informasi keragaman potensi daya saing daerah kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu dapat disederhanakan melalui penetapan tipologi daya saing masing-masing daerah. Dalam hal ini, tipologi daya saing daerah kabupaten/kota di Provinsi Riau dihipotesiskan menghasilkan kategori atau tingkatan daya saing daerah kabupaten/kota yang tinggi, sedang (rata-rata) dan rendah berdasarkan pada besaran indikator-indikator yang dianalisis.

Mengacu pada faktor-faktor yang mempengaruhi daya saing daerah sebagaimana yang telah diuraikan, secara keseluruhan indikator atau aspek yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: (1) perekonomian dan keuangan daerah, (2) aktivitas perekonomian penduduk, (3) ketenagakerjaan, (4) kependudukan (5) transportasi dan komunikasi, (6) kesenjangan daerah (pendidikan dan kesehatan), (7) perumahan dan lingkungan, (8) potensi sumberdaya daerah (Pertanian, Peternakan, Perikanan, Perkebunan dan Sosial), dan (9) pemerintahan dan rentang kendali. Perbedaan tipologi daya saing antara daerah kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu tersebut berimplikasi pada perbedaan karakteristik daya saing daerah antara tipologi daya saing daerah tersebut. Hal ini mengandung pengertian bahwa terdapat perbedaan yang signifikan

antara karakteristik tipologi daya saing daerah yang satu dengan karakteristik tipologi daya saing daerah lainnya.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian Analisis Daya Saing Kabupaten Indragiri Hulu

Keseluruhan hasil analisis tersebut selanjutnya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi para perumus dan pelaksana kebijakan serta program peningkatan daya saing daerah. Secara berkesinambungan, hasil penetapan tipologi tersebut juga dapat di perbaharui (*updating*) dan dievaluasi sesuai dengan perkembangan dan dinamika yang berpengaruh di tiap-tiap daerah. Hal tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap orientasi kebijakan dan program-program pembangunan daerah yang akan disusun dan dilaksanakan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tipologi daya saing daerah kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu menurut masing-masing indikator daya saing daerah diklasifikasikan menjadi tiga kelompok kategori yaitu tinggi, sedang dan rendah, untuk seluruh indikator yang dianalisis. Hasil analisis kategori daya saing daerah berdasarkan pada seluruh indikator daya saing daerah yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Tipologi Daya Saing Daerah Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu Menurut Masing-masing Daya Saing Daerah.

No	Kecamatan	X1	X2	X3	X4	X5	X61	X62	X7	X81	X82	X83	X84	X85	X9
1	Peranap	S	S	S	S	S	S	S	S	S	T	R	R	S	S
2	Batang Peranap	T	S	S	S	R	R	R	S	S	S	S	T	R	R
3	Seberida	R	R	S	T	S	T	T	T	R	S	R	T	T	S
4	Batang Gangsal	S	R	R	T	R	S	S	R	S	T	R	T	R	S
5	Batang Cenaku	R	T	S	T	R	S	S	R	S	T	T	R	T	T
6	Kelayang	R	S	R	R	R	S	S	S	R	S	R	S	S	T
7	Rakit Kulim	S	S	R	R	R	R	R	R	S	S	S	S	T	S
8	Pasir Penyu	T	S	T	S	T	T	S	T	R	R	S	T	R	S
9	Lirik	S	R	T	S	T	T	S	T	R	R	R	R	R	S
10	Sungai lala	R	S	R	R	R	S	R	R	S	R	R	R	R	R
11	Lubuk Batu Jaya	S	R	S	S	R	S	R	S	R	R	T	S	S	R
12	Rengat Barat	S	S	T	T	S	T	T	S	S	S	S	S	S	T
13	Rengat	T	S	T	S	S	T	T	T	T	T	S	R	S	T
14	Kuala Cenaku	S	R	S	R	R	R	R	R	S	R	T	R	S	R

Sumber : Data Olahan

Keterangan :

- X1 : Perekonomian dan Keuangan Daerah
- X2 : Aktivitas Perekonomian Penduduk
- X3 : Ketenagakerjaan
- X4 : Kependudukan
- X5 : Transportasi dan Komunikasi
- X61 : Kesenjangan Pendidikan
- X62 : Kesenjangan Kesehatan
- X7 : Perumahan dan Lingkungan
- X81 : Sumberdaya Pertanian
- X82 : Sumberdaya Perternakan
- X83 : Sumberdaya Perikanan
- X84 : Sumberdaya Perkebunan
- X85 : Sumberdaya Sosial
- X9 : Pemerintahan dan Rentang Kendali
- T : Tinggi
- S : Sedang
- R : Rendah

Berdasarkan hasil analisis tipologi daya saing daerah kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu menurut masing-masing indikator daya saing daerah tersebut, selanjutnya dapat ditentukan tipologi daya saing daerah secara keseluruhan melalui pemberian skor dan ranking setiap daerah kecamatan. Pemberian skor didasarkan pada kategori tipologi masing-masing daerah dari hasil analisis sebelumnya, yakni untuk daerah yang termasuk kategori tinggi diberi skor sebesar 5, kategori sedang diberi skor sebesar 3 dan kategori rendah diberi Skor 1. Kemudian dari nilai total skor tersebut dapat dilakukan pemberian ranking terhadap masing-masing daerah dengan mengurutkan nilai total skor yang tertinggi ke nilai total skor terendah tipologi daya saing daerah.

Selanjutnya mengacu pada hasil penetapan tipologi daya saing daerah kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu tersebut, memperlihatkan tingkat daya saing antar-daerah kecamatan saling berbeda. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat perbedaan tipologi daya saing antar-daerah menurut indikator daya saing daerah yang dianalisis. Berdasarkan hasil analisis tipologi daya saing daerah seluruh indikator yang dianalisis tersebut, menunjukkan bahwa kategori tipologi daya saing tinggi adalah sebanyak 4 kecamatan. Kecamatan yang termasuk kategori daya saing sedang sebanyak 4 kecamatan. Sementara itu, kategori tipologi daya saing rendah sebanyak 6 kecamatan. Adapun kecamatan yang termasuk kategori daya saing tinggi adalah Kecamatan Rengat, Seberida, Batang Cenaku, dan Pasir Peny. Kecamatan yang termasuk kategori tipologi sedang adalah Kecamatan Seberida,

Lirik, Batang Gangsal, Sungai Lala, dan Kuala Cenaku. Selanjutnya kecamatan kategori daya saing rendah adalah Kecamatan Rengat Barat, Batang Peranap, Kelayang, Rakit Kulim, Lubuk Batu Jaya dan Peranap.

Tabel 2. Tipologi Daya Saing Daerah Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu Menurut Seluruh Daya Saing Daerah

No	Kecamatan	Total Skor	Ranking	Kategori
1	Rengat	48	1	Tinggi
2	Seberida	46	2	Tinggi
3	Batang Cenaku	46	2	Tinggi
4	Pasir Penyau	44	3	Tinggi
5	Lirik	42	4	Sedang
6	Batang Gangsal	38	5	Sedang
7	Sungai lala	36	6	Sedang
8	Kuala Cenaku	36	6	Sedang
9	Rengat Barat	34	7	Rendah
10	Batang Peranap	32	8	Rendah
11	Kelayang	30	9	Rendah
12	Rakit Kulim	30	9	Rendah
13	Lubuk Batu Jaya	30	9	Rendah
14	Peranap	22	10	Rendah

Sumber : Data Olahan

Keterangan : Kategori Tinggi : Rangkaing 1-3
 Kategori Sedang : Rangkaing 4-6
 Karegori Redah : Rangkaing 7-10

A. Karakteristik Tipologi Daya Saing Daerah

Berdasarkan hasil analisis tipologi daya saing daerah seluruh indikator yang dianalisis seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa tipologi daya saing daerah yang dikategorikan berdasarkan tiga kelompok yaitu rendah, sedang dan tinggi. Daerah-daerah yang termasuk dalam masing-masing kategori tipologi daya saing tersebut memiliki karakteristik daya saing yang berbeda antar-daerah kecamatan di Kabupaten Indragiri hulu.

Karakteristik tipologi daya saing daerah diperoleh berdasarkan pada indikator pembentuk daya saing daerah pada masing-masing kategori tipologi. Daerah-daerah yang termasuk dalam kategori tipologi daya saing daerah yang tinggi memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Perekonomian dan keuangan daerah, yakni PDRB per kapita, kontribusi PDRB terhadap PDRB total, rasio penerimaan daerah terhadap pengeluaran daerah rutin dan rasio penerimaan daerah terhadap PDRB. dimana nilai rata-rata kategori tipologi daya saing tinggi sektor tersebut masing-masing sebesar 28,73 Juta Rupiah, 0,25, dan 44.192,10.
2. Aktivitas Perekonomian Penduduk, yakni sebagian besar aktivitas penduduk pada sektor pertanian, industri, air listrik dan gas, angkutan dan komunikasi serta sektor jasa, dimana nilai rata-rata kategori tipologi daya saing tinggi sektor tersebut masing-masing sebesar 78,49%, 11,21%, 7,23% 26,95% dan 44,43%.
3. Ketenagakerjaan, yakni pada tingkat partisipasi angkatan kerja, pesentase penduduk yang bekerja dan tingkat pengangguran. Dimana nilai rata-rata kategori tipologi daya saing tinggi sektor tersebut masing-masing sebesar 14,84%, 55,70% dan 7,08%.
4. Kependudukan, yakni sektor jumlah penduduk, kepadatan penduduk, rasio penduduk berdasarkan jenis kelamin dan penduduk usia kerja. dimana nilai rata-rata kategori tipologi daya saing tinggi sektor tersebut masing-masing sebesar 37.486 jiwa, 37 jiwa/km², 109,68 %, dan 9,81%.
5. Transportasi dan komunikasi yakni, sektor persentase rumah tangga yang memiliki kendaraan bermotor roda 2, 3, perahu atau perahu motor, persentase rumah tangga yang memiliki kendaraan bermotor roda 4, persentase rumahtangga pelanggan telepon, persentase rumahtangga yang memiliki televisi dan persentase desa yang terdapat kantor pos. Dimana nilai rata-rata sektor tersebut masing-masing sebesar 6,75%, 8,73%, 11,11%, 5,65% dan 8,33%.
6. Kesenjangan pendidikan, yakni rasio antara murid-guru SLTA dan rasio murid-sekolah SLTA, dengan nilai rata-rata masing-masing sebesar 330,36 dan 13,04. Selanjutnya kesenjangan, terdapat Rasio Jumlah Tenaga Kerja Medis terhadap Jumlah Penduduk, Rasio Jumlah Sarana Kesehatan terhadap Jumlah Penduduk dan Angka Kematian Bayi. Dimana nilai rata-rata masing-masing sebesar 0,004, 0,000001 dan 12,50.
7. Perumahan dan lingkungan, yakni sektor Persentase Rumahtangga yang memiliki Rumah dengan Luas Lantai 50-99 meter, Persentase Rumahtangga yang memiliki Rumah dengan Lantai Semen atau Bata dan Persentase Rumahtangga yang dapat

Akses Air Bersih. Dimana nilai rata-rata masing-masing sebesar 12,79%, 9,91% dan 11,05%.

8. Sumberdaya pertanian, yakni produksi jagung, ubi kayu dan ubi jalar dengan nilai rata-rata masing-masing sebesar 99,12 ton, 745,76 ton, dan 138,43 ton. Selanjutnya sumberdaya perikanan, yakni pada produksi ikan perairan umum dengan nilai rata-rata sebesar 242,33 ton. Sementara itu sumberdaya perkebunan, yakni produksi karet, kelapa sawit dan kelapa dalam. Dimana nilai rata-rata masing-masing sector tersebut yaitu sebesar 12.028,70 ton, 32.654,75 ton, dan 286,25 ton. Kemudian sumberdaya sosial, yakni organisasi sosial, dan lembaga keagamaan, dimana nilai rata-rata masing-masing sebesar 0,00001% dan 28,58 %.
9. Pemerintahan dan rentang kendali, yakni jumlah kelurahan dan/atau desa (rata-rata 18 buah), dan rasio PNS daerah terhadap jumlah penduduk. Dimana nilai rata-rata masing-masing sector tersebut adalah 18 buah dan 0,01.

Selanjutnya karakteristik kategori tipologi daya saing sedang adalah sebagai berikut :

1. Kesenjangan pendidikan, yakni pada rasio murid-guru SD, rasio murid guru SLTPU, dan rasio murid-sekolah SD. Dimana nilai rata-rata kategori tipologi daya saing Sedang sektor tersebut masing-masing sebesar 25,99, 16,86 dan 197,25.
2. Sumberdaya Sumberdaya pertanian, yakni lahan non sawah produktif, dengan nilai rata-rata sebesar 67.348,67 Ha. sumberdaya peternakan, yakni populasi sapi, kerbau, kambing, Domba, dan unggas. Dimana nilai rata-rata sebesar 3.327 buah, 301 buah, 4.200 buah dan 100 buah. Selanjutnya Sumberdaya Perikanan, yakni produksi ikan kolam dengan nilai rata-rata sebesar 1.334,67 ton

Sementara itu, karakteristik pada kategori tipologi daya saing rendah adalah sebagai berikut :

1. Kependudukan, yakni sektor persentase balita dan persentase penduduk usia sekolah. dimana nilai rata-rata kategori tipologi daya saing rendah sektor tersebut masing-masing sebesar 20,66% dan 9,81.

2. Sumberdaya pertanian, yakni luas lahan sawah, produksi padi, produksi kacang tanah, produksi kacang hijau, dan produksi cabe. Dimana nilai rata-ran masing-masing sektor tersebut yaitu sebesar 3.686,33 Ha, 4.174,56 ton, 9,97 ton, 5,91 ton, dan 124,33 ton. Sementara itu, sumberdaya peternakan pada sektor populasi unggas dengan nilai rata-ran sebesar 98.156 buah. Selanjutnya sumberdaya sosial pada sektor organisasi kemasyarakatan (Muhammadiyah, ICMI, MKGR, Kowani, dsb) dan Perkumpulan sosial/kebudayaan/olahraga/hobi (Orari, IMI, padepokan seni, dsb), dengan nilai rata-ran masing-masing sektor sebesar 0,00001% dan 12,10%.
3. Pemerintahan dan rentang kendali, yakni luas daerah keseluruhan dan, rata-ran jarak antara daerah kabupaten/kota. dimana nilai rata-ran masing-masing sektor tersebut yaitu sebesar 916,95 km² dan 47 km².

B. Keterkaitan Antar Indikator Daya Saing Daerah

Keterkaitan antar indikator daya saing daerah dianalisis dengan menggunakan analisis korelasi. Hasil analisis korelasi tersebut saling berkorelasi secara signifikan pada taraf 1–5 %. Hal ini mengandung pengertian bahwa antara indikator daya saing daerah yang satu dengan indikator-indikator lainnya saling terkait.

Berdasarkan hasil analisis korelasi bahwa indikator perekonomian dan keuangan daerah dapat dinyatakan berkorelasi dengan indikator aktivitas perekonomian penduduk, transportasi dan komunikasi. Sementara itu, indikator transportasi dan komunikasi berkorelasi secara nyata dengan kesenjangan daerah, perumahan dan lingkungan.

Indikator aktivitas perekonomian penduduk, berkorelasi secara nyata dengan indikator ketenagakerjaan, transportasi dan komunikasi, serta sumberdaya daerah. Sementara itu, ketenagakerjaan berkorelasi secara nyata dengan indikator aktivitas perekonomian penduduk, transportasi dan komunikasi, kesenjangan daerah, perumahan dan lingkungan dan indikator sumberdaya daerah.

Selanjutnya indikator kependudukan berkorelasi secara nyata dengan indikator transportasi dan komunikasi, kesenjangan daerah, perumahan dan lingkungan, sumberdaya daerah, dan indikator pemerintahan dan rentang kendali. Sementara itu, indikator

perumahan dan lingkungan selain berkorelasi secara nyata dengan indikator, sumberdaya daerah.

Kemudian indikator sumberdaya daerah berkorelasi secara nyata dengan indikator aktivitas perekonomian penduduk, kependudukan, kesenjangan daerah, perumahan dan lingkungan, dan indikator pemerintahan dan rentang kendali. Sementara itu, indikator pemerintah dan rentang kendali berkorelasi secara nyata dengan indikator kependudukan, kesenjangan daerah dan indikator sumberdaya daerah.

C. Kebijakan Umum Peningkatan Daya Saing Daerah Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu

Kebijakan umum peningkatan daya saing daerah kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu dari uraian sebelumnya dapat dirumuskan kebijakan berdasarkan pada analisis tipologi daya saing daerah. Dimana implikasi kebijakan tersebut mengacu pada skala prioritas indikator pembangunan daerah mulai dari yang terendah. Kategori tipologi daya saing rendah berdasarkan pada dominasi daerah yang termasuk dalam kategori rendah pada masing-masing indikator daya saing yang dianalisis. Faktor-faktor keunggulan daya saing daerah diperoleh berdasarkan pada dominasi daerah yang termasuk dalam kategori tinggi.

Adapun rumusan implikasi kebijakan peningkatan daya saing daerah kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu secara berturut-turut sebagai berikut:

1. Transportasi dan Komunikasi
2. Pengelolaan Potensi Sumberdaya Daerah (Pertanian, Peternakan, Perikanan, Perkebunan dan Sosial).
3. Aktivitas Perekonomian Penduduk
4. Perekonomian dan Keuangan Daerah
5. Kesenjangan Daerah (Pendidikan dan Kesehatan)
6. Ketenagakerjaan.
7. Kependudukan
8. Perumahan dan Lingkungan
9. Pemerintahan dan Rentang Kendali

Selanjutnya, berdasarkan pada urutan prioritas implikasi kebijakan tersebut di atas, dapat diformulasikan kebijakan umum yang dapat ditempuh dalam upaya meningkatkan daya saing daerah Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan dan peningkatan infrastruktur transportasi khususnya di Kecamatan Batang Cenaku Batang Gangsal, Seberida, Batang Peranap, Peranap, Rakit Kulim, Sungai Lala, Lubuk Batu Jaya, Kuala Cenaku dan Kelayang, berupa pengembangan dan perbaikan jalan, jembatan, terminal. Selain itu, juga hendaknya didukung dengan telekomunikasi untuk memudahkan pertukaran data dan informasi dalam daerah sendiri serta antar daerah lainnya, meningkatkan koordinasi dan fasilitas pengembangan kemitraan, serta pendukung lainnya, seperti listrik, gas dan air bersih.
2. Pengembangan potensi sumberdaya daerah (pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan sosial), berupa pengembangan lahan potensial, meningkatkan kelembagaan sosial ekonomi usaha petani produktif, peningkatan bantuan dan pembinaan serta peningkatan insentif investasi agribisnis, pemasaran komoditas dan industri pendukung industri pertanian. Hendaknya di tujukan kepada Kecamatan Batang Peranap, Seberida, Batang Gangsal, Batang Cenaku, Kelayang, Pasir Penyau, Sungai Lala, Lubuk Batu Jaya, Rengat dan Kuala Cenaku. Pengelolaan potensi sumberdaya daerah sosial (*social capital* , terutama di daerah Kecamatan Batang Peranap, Batang Gangsal, Pasir Penyau, Lirik, Sungai Lala. Berupa peningkatan partisipasi aktif masyarakat dan pemberdayaan institusi sosial dan kemasyarakatan yang ada seperti karang taruna, keagamaan, arisan dan olahraga.
3. Peningkatan dan pengembangan aktivitas perekonomian penduduk khususnya di Kecamatan Seberida, Batang Gangsal, Lirik, Kuala Cenaku, Lubuk Batu Jaya dan Lirik. Aktivitas perekonomian penduduk hendaknya diarahkan pada pengembangan *home-industry* yang menghasilkan produk-produk yang bernilai tambah tinggi, tidak hanya menghasilkan produk-produk pertanian primer. Upaya pemerintah untuk membantu permodalan dan peningkatan keahlian masyarakat dibidang agroindustri dan meningkatkan jiwa kewirausahaan perlu dilakukan sebagai modal utama untuk menggerakkan aktivitas perekonomian daerah secara keseluruhan. Selanjutnya

pemerintah hendaknya membangun dan menjembatani kemitraan dengan pengusaha yang lebih kuat.

4. Peningkatan perekonomian dan keuangan daerah, khususnya di Kecamatan Batang Cenaku, Batang Gangsal, Seberida, Batang Peranap, Peranap dan Lubuk Batu Jaya. Disamping itu pengalokasian dana yang lebih besar pada dana pembangunan perlu dilakukan. Upaya untuk pengembangan dan peningkatan perekonomian dan keuangan daerah .
5. Menekan kesenjangan daerah melalui program-program pemerataan pendapatan berupa subsidi pendidikan dan kesehatan serta pemberian bantuan sosial dan bantuan kredit tanpa bunga kepada rumahtangga-rumahtangga berpendapatan rendah. Prioritas program menekan kesenjangan daerah hendaknya ditujukan pada Kecamatan Batang Cenaku, Rakit Kulim, Kuala Cenaku, Batang Peranap, Sungai Lala.
6. Penciptaan kesempatan kerja yang lebih luas melalui program-program padat karya, meningkatkan penyebaran informasi pasar kerja dan pendaftaran pencari kerja dan lowongan kerja. Disamping itu program pelatihan dan bimbingan dibidang kewirausahaan dan pelatihan keahlian khusus perlu dilakukan. Khususnya daerah Kecamatan Batang Gangsal, Kelayang, Rakit Kulim, dan Sungai Lala.
7. Mengurangi tingkat kepadatan penduduk dan meningkatkan taraf hidup penduduk miskin. Upaya ini perlu dilakukan khususnya di Kecamatan Kelayang, Rakit Kulim, Sungai Lala dan Kuala Cenaku. Sementara itu untuk menekan angka kemiskinan dalam jangka pendek dapat dilakukan dengan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat miskin. Namun dalam jangka panjang perlu dilakukan program-program yang sistematis sehubungan dengan pendistribusian aset dan program-program penciptaan kerja bagi masyarakat berpendapatan rendah.
8. Peningkatan kuantitas dan kualitas perumahan dan lingkungan. Upaya ini perlu diprioritaskan, khususnya di Kecamatan Batang Cenaku, Batang Gangsal, Kuala Cenaku, Sungai Lala, dan Rakit kulim.
9. Penguatan pemerintahan dan rentang kendali pada daerah-daerah yang luas, khususnya Kecamatan Batang Peranap, Sungai Lala, Lubuk Batu Jaya dan Kuala Cenaku, Peningkatan kuantitas dan kualitas pusat-pusat pelayanan melalui pemekaran kecamatan

dan atau desa serta kuantitas dan kualitas aparatur pemerintahan dan lembaga terkait perlu dilakukan.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan tujuan penelitian, maka dapat disimpulkan dari hasil penelitian beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan sembilan indikator dapat disimpulkan bahwa daerah dengan kategori tipologi daya saing tinggi adalah sebanyak 4 kecamatan. Termasuk kategori Sedang 4 kecamatan dan kategori rendah 6 kecamatan. Adapun kecamatan yang termasuk kategori tipologi daya saing tinggi adalah Kecamatan Rengat, Seberida, Batang Cenaku, Pasir Penyu. Kecamatan yang termasuk kategori sedang adalah Kecamatan Seberida, Lirik, Batang Gangsal, Sungai Lala, dan Kuala Cenaku. Kecamatan kategori rendah adalah Kecamatan Rengat Barat, Batang Peranap, Kelayang, Rakit Kulim, Lubuk Batu Jaya dan Peranap.
2. Karakteristik tipologi daya saing daerah kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu pada masing-masing tipologi daya saing menunjukkan adanya perbedaan. Adapun tipologi daya saing tinggi memiliki karakteristik yakni (1) Perekonomian dan keuangan daerah, yakni PDRB per kapita, kontribusi PDRB terhadap PDRB total, rasio penerimaan daerah terhadap pengeluaran daerah rutin dan rasio penerimaan daerah terhadap PDRB, (2) Aktivitas Perekonomian Penduduk, yakni sebagian besar aktivitas penduduk pada sektor pertanian, industri, air listrik dan gas, angkutan dan komunikasi serta sektor jasa, (3) Ketenagakerjaan, yakni pada tingkat partisipasi angkatan kerja, pesentase penduduk yang bekerja dan tingkat pengangguran, (4) Kependudukan, yakni sektor jumlah penduduk, kepadatan penduduk, rasio penduduk berdasarkan jenis kelamin dan penduduk usia kerja, (5) Transportasi dan komunikasi yakni, sector Persentase Rumahtangga yang Memiliki Kendaraan Bermotor Roda 2, 3, Perahu atau Parahu Motor, Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Kendaraan Bermotor Roda 4, Persentase Rumahtangga Pelanggan Telepon, Persentase Rumahtangga yang memiliki

Televisi dan Persentase Desa yang Terdapat Kantor Pos, (6) Kesenjangan Pendidikan, yakni rasio antara murid-guru SLTAU dan rasio murid-sekolah SLTU, Selanjutnya kesenjangan kesehatan, terdapat Rasio Jumlah Tenaga Kerja Medis terhadap Jumlah Penduduk, Rasio Jumlah Sarana Kesehatan terhadap Jumlah Penduduk dan Angka Kematian Bayi, (7) Perumahan dan lingkungan, yakni sektor Persentase Rumahtangga yang memiliki Rumah dengan Luas Lantai 50-99 meter, Persentase Rumahtangga yang memiliki Rumah dengan Lantai Semen atau Bata dan Persentase Rumahtangga yang dapat Akses Air Bersih, (8) Sumberdaya pertanian, yakni produksi jagung, ubi kayu dan ubi. Selanjutnya sumberdaya perikanan, yakni pada produksi ikan perairan umum. Sementara itu sumberdaya perkebunan, yakni produksi karet, kelapa sawit dan kelapa dalam. Kemudian sumberdaya sosial, yakni organisasi sosial, dan lembaga keagamaan, dan (9) Pemerintahan dan rentang kendali, yakni jumlah kelurahan dan/atau desa (rata-rata 18 buah), dan rasio PNS daerah terhadap jumlah penduduk. Selanjutnya karakteristik kategori tipologi daya saing sedang yakni : (1) Kesenjangan pendidikan, yakni pada rasio murid-guru SD, rasio murid guru SLTPU, dan rasio murid-sekolah SD, (2) Sumberdaya Sumberdaya pertanian, yakni lahan non sawah produktif, sumberdaya peternakan, yakni populasi sapi, kerbau, kambing, Domba, dan unggas, Selanjutnya Sumberdaya Perikanan, yakni produksi ikan kolam. Sementara itu, karakteristik pada kategori tipologi daya saing rendah yakni : (1) Kependudukan, yakni sektor persentase balita dan persentase penduduk usia sekolah, (2) Sumberdaya pertanian, yakni luas lahan sawah, produksi padi, produksi kacang tanah, produksi kacang hijau, dan produksi cabe. Sementara itu, sumberdaya peternakan pada sektor populasi unggas. Selanjutnya sumberdaya sosial pada sektor Organisasi kemasyarakatan (Muhammadiyah, ICMI, MKGR, Kowani, dsb) dan Perkumpulan sosial/kebudayaan/olahraga/hobi (Orari, IMI, padepokan seni, dsb), dan (3) Pemerintahan dan rentang kendali, yakni luas daerah keseluruhan dan, rata-rata jarak antara daerah kabupaten.

3. Keterkaitan antar indikator daya saing daerah kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu secara keseluruhan sebahagian besar indikator daya saing daerah yang dianalisis saling berkorelasi secara signifikan. Namun terdapat beberapa indikator yang tidak

menunjukkan korelasi secara signifikan dengan beberapa indikator lainnya seperti indikator perekonomian dan keuangan daerah tidak berkorelasi signifikan dengan indikator aktivitas perekonomian penduduk, ketenagakerjaan, kependudukan, kesenjangan daerah, perumahan dan lingkungan, potensi sumber daya daerah, dan pemerintahan dan rentang kendali. Demikian halnya dengan indikator ketenagakerjaan tidak berkorelasi dengan indikator kependudukan, potensi sumberdaya daerah dan pemerintahan rentang kendali, sedangkan Selain itu, indikator perumahan dan lingkungan tidak berkorelasi signifikan dengan indikator pemerintahan rentang kendali. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada kenyataannya masing-masing indikator tersebut tidak terintegrasi satu sama lain dalam membentuk daya saing daerah, meskipun secara teoritis tidak demikian berdampak pada disparitas daya saing antar daerah Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu.

4. Berdasarkan indikator daya saing, dapat dirumuskan implikasi kebijakan peningkatan daya saing daerah kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan skala prioritas pembangunan, secara berturut-turut indikator daya saing yang perlu diperhatikan adalah (1) Pengembangan dan peningkatan infrastruktur transportasi berupa pengembangan dan perbaikan jalan, jembatan, terminal dan pelabuhan (2) Pengembangan potensi sumberdaya daerah (pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan sosial), (3) Pengembangan dan peningkatan aktivitas perekonomian penduduk, (4) Peningkatan perekonomian dan keuangan daerah, (5) kesenjangan daerah, (6) Penciptaan kesempatan kerja yang lebih luas melalui program-program padat karya, meningkatkan penyebarluasan informasi pasar kerja dan pendaftaran pencari kerja dan lowongan kerja, (7) Mengurangi tingkat kepadatan penduduk dan meningkatkan taraf hidup penduduk miskin, (8) Peningkatan kuantitas dan kualitas perumahan dan lingkungan, dan (9) pemerintahan dan rentang kendali.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian maka saran yang dapat dilakukan untuk penelitian selanjutnya :

1. Perlu kajian pengembangan konsep, teori dan metodologi penelusuran dan eksplorasi kelengkapan indikator atau peubah daya saing daerah lainnya yang belum digunakan, yang terkait dengan ketersediaan data dan informasi yang lebih terkini, *valid* dan *feasible*,, serta mampu meminimumkan kesalahan-kesalahan dalam perolehan data dan informasi agar sesuai dengan fenomena riil dilapangan.
2. Untuk memperoleh validitas hasil tipologi dan kebijakan atau upaya peningkatan daya saing daerah Kecamatan secara spesifik, perlu dilakukan penelitian lanjutan berupa studi kasus pada salah satu daerah Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu yang dianalisis.

DAFTAR PUSTAKA

- Daryanto, A. 2003. Teknik Pengkajian Sumberdaya dalam Mengembangkan Potensi Ekonomi Lokal dan Regional. Disampaikan pada Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pengembangan Ekonomi dan Usaha Daerah. Hotel Sri Varita, 28 April-3 Mei 2003, Jakarta.
- Riyadi, D.M.M. 2000. Implikasi UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999 terhadap Pembangunan Daerah: Strategi Pengembangan Potensi Daerah. *Perencanaan Pembangunan*, (19): 18-27.
- Riyadmadji, D. 1997. Konsep Model Otonomi Daerah Tingkat II. *Info Penelitian dan Pengembangan*, Departemen Dalam Negeri, 2 (2): 5-12.